

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2)
- (b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- (c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , tentang Pemerintah Daerah
- (d) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

- (e) Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25
- (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- (h) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024
- (i) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024
- (j) Peraturan Bupati Badung No.14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Badung No. 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- (k) Peraturan Bupati Badung No. 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung No.33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
- (l) Peraturan Bupati Badung No. 56 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

### ***1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan***

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1.Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

## Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja

## Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Penjelasan belanja yang realisasi keuangannya dibawah 75%

## Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.2. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang adadalam standar akuntansi pemerintah

## Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Neraca

## Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

## Bab VII Kesimpulan Penting tentang Laporan Keuangan

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Pemerintah Kabupaten Badung telah berhasil melakukan capaian kinerja secara akumulatif terhadap aspek-aspek yang sifatnya indikator makro ekonomi dan indikator sosial yang strategis. Adapun aspek capaian indikator makro ekonomi dan sosial meliputi: pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, IPM, kemiskinan dan pengangguran.

Tingkat inflasi Kabupaten Badung selalu berada dibawah tingkat inflasi nasional. Kondisi ini menunjukkan kemampuan dan ketahanan perekonomian masyarakat Kabupaten Badung. Sedangkan untuk angka IPM Kabupaten Badung cukup tinggi diantara Kabupaten di Bali. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun menurun. Langkah-langkah yang telah ditempuh antara lain melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan.

#### **2.2. Kebijakan Keuangan**

Dalam penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

- 1) Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan
  - a. Mengevaluasi Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan sesuai kondisi di lapangan.
  - b. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang ada.
  - c. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
  - d. Mengembangkan koordinasi secara sinergis antara satuan kerja terkait di bidang pendapatan daerah.
- 2) Arah dan kebijakan umum bagian belanja
  - a. Belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
  - b. Belanja daerah pada tiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerjanya
  - c. Belanja daerah dialokasikan untuk melaksanakan program, kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis)
  - d. Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif mewujudkan sasaran kinerja
- 3) Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan
  - a. Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah
  - b. Pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memenuhi kewajiban daerah yang segera harus dipenuhi.
  - c. Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Berdasarkan kondisi dan permasalahan pembangunan Kabupaten Badung serta untuk mewujudkan adanya peningkatan pembangunan dikaitkan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 maka dirumuskan sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

#### 1. Visi dan Misi

Sesuai dengan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika KabupatenBadung yakni :

- Visi :

Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat badung Melalui Pembangunan yang Berlandaskan Tri Hita Karana.

- Misi :

1. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
3. Memperkuat pembangunan bidang pertanian,perikanan dan kelautan yang bersaing dengan kepariwisataan berbasis budaya.

#### 2. Tujuan dan Sasaran.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas, dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung maka tujuan dan Sasaran yang ditetapkan adalah :

- Tujuan :

1. Meningkatkan pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi.
2. Meningkatkan Pemberian Pelayanan kepada masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informasi.
3. Meningkatkan SDM sektor Komunikasi dan Informasi.

- Sasaran :

1. Terwujudnya pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi sesuai kebutuhan.
2. Terwujudnya pelayanan kebutuhan masyarakat akan jasa komunikasi dan informasi yang andal, efektif dan efisien.
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) sektor Komunikasi dan Informatika yang mampu dan terampil di bidangnya.

4. Terwujudnya peran serta masyarakat di bidang komunikasi dan komunikasi yang tertib, aman, lancar dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5. Terwujudnya aparatur dan masyarakat yang berbudaya informasi.
6. Terwujudnya pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi informasi secara efektif dan efisien.

3. Rencana Kerja :

Setelah ditetapkan Tujuan maupun Sasaran, lebih lanjut perlu adanya program dan kegiatan untuk mencapai tujuan / sasaran tersebut. Pelaksanaan program dan kegiatan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- Program pengelolaan aplikasi informatika
- Program penyelenggaraan statistik sektoral
- Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

### Bab III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024.

**Tabel.3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja LRA per 31 Desember 2024**

Capaian pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp. 0. Komponen pendapatan terdiri omponen pendapatan asli, daerah terdiri dari:

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 0

Retribusi Tahun 2024 sebagai berikut

Uraian	Anggaran	R 2024	%
Jasa Giro	10.000.000	-	0
Pengembalian Kelebihan	0	-	0
Jumlah	10.000.000	-	0

Komponen Lain2 PAD terdiri dari:

		Rp	Rp	
1.	Belanja operasi	74.820.238.265,00	62.948.810.774,00	89,33
2.	Belanja Modal	26.164.233.281	426.811.855,00	1,63
	<b>Jumlah</b>	<b>100.984.471.546,00</b>	<b>63.375.622.629,00</b>	<b>62,76</b>

Capaian belanja sebesar 62,76 % terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut. Komponen belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal

**Tabel 3.2 Realisasi Belanja Tahun 2024**

Uraian	Anggaran	R 2024	%
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Belanja operasi Tahun 2024 sebesar Rp. 63.375.622.629,00

atau sebesar 62,76 % dari anggaran Rp. 100.984.471.546. Komponen Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa

Komponen Belanja pegawai terdiri dari

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp.12.848.197.431 atau 73,01 dari anggaran Rp. 17.597.696.516,00

Uraian	Anggaran (Rp)	R 2024 (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	5.777.478.849	4.419.784.762	76,50
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.820.217.667	8.428.412.669	71,31
Honorarium PNS	-	-	0
Honorarium Non PNS	-	-	0
<b>Jumlah</b>	<b>17.597.696.516</b>	<b>12.848.197.431</b>	<b>73,01</b>

Belanja Barang Jasa Tahun 2024 dari Pagu anggaran sebesar Rp. 57.222.541.749,00 terealisasi sebesar Rp. 50.100.613.343

Uraian	Anggaran	R 2023	%
Belanja Barang Jasa	57.222.541.749,00	50.100.613.343,00	87,55
<b>Jumlah</b>	<b>57.222.541.749,00</b>	<b>50.100.613.343,00</b>	<b>87,55</b>

Komponen Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

Uraian	Anggaran	R 2024	%
Belanja Barang Pakai Habis	584.949.643,00	389.817.800,00	66,64
Belanja Jasa Kantor	42.147.995.066,00	38.562.060.128,00	91,49
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	195.716.620,00	195.692.152,00	99,99
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	252.689.172,00	49.571.923,00	19,62
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	49.950.000,00		0,00
Layanan	299.857.150,00	262.782.840,00	87,64
Belanja Kursus Pelatihan ,Sosialisasi , Bimbingan Teknis dan Pelatihan	21.000.000,00		0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.403.304.668,00	10.426.787.500,00	77,79
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.076.906,00	16.765.000,00	98,17
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	139.002.524,00	132.336.000,00	95,20
Belanja Perjalanan Dinas	64.800.000,00	64.800.000,00	100,00
Belanja Uang dan/Atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga	46.200.000,00	-	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.222.541.749,00</b>	<b>50.100.613.343,00</b>	<b>87,55</b>

Komponen Belanja Modal terdiri dari:

Uraian	Anggaran	R 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.164.233.281	<b>426.811.855,00</b>	1,63
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya	-	-	0
Jumlah	26.164.233.281,00	426.811.855,00	1,63

Belanja tersebut di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, yang terinci sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Realisasi Belanja di Tiap Program Tahun 2024**

No	Program	Aggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.948.213.932	14.362.301.994	72,00
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	8.934.054.210	7.630.867.680	85,41
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	72.005.458.764	41.298.259.355	57,35
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	79.759.415	70.305.100	88,15
5	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	16.985.225	13.888.500	81,77
	<b>JUMLAH</b>	<b>100.984.471.546,00</b>	<b>63.375.622.629,00</b>	<b>62,76</b>

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah

- Masukan dana : Rp. 49.446.595,-
- Realisasi : Rp. 48.380.560,-
- Keluaran : Presentase dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Hasil : Presentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu Dengan realisasi 97,84 %.
- Sasaran : Diskominfo Kabupaten Badung.

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Masukan dana : Rp. 47.123.055.-
- Realisasi : Rp. 46.128.060,-
- Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Hasil : Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangka daerah Dengan realisasi 8 dokumen dengan presentase 93,90 %
- Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Masukan dana : Rp. 17.597.696.516,-

- Realisasi : Rp. 12.848.197.431,-,
  - Keluaran : Presentase Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN .
  - Hasil : Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN  
Dengan realisasi 73.01 %.
  - Sasaran : Diskominfo Badung
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
- Masukan dana : Rp. 20.264.400-
  - Realisasi : Rp16.872.200,-
  - Keluaran : Jumlah SPJ,SPP, SPM yang terverifikasi.
  - Hasil : Jumlah SPJ,SPP,SPM ang terverifikasi  
Dengan realisasi 83,26 %
  - Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD
- Masukan dana : Rp. 9.079.600-
  - Realisasi : Rp 8.063.700,-
  - Keluaran : Jumlah SPJ Fungsional yang akuntabel
  - Hasil : Jumlah SPJ Fungsional yang akuntabel  
Dengan realisasi 12 Laporan,dengan realisasi 88,81%
  - Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun
- Masukan dana : Rp. 2.848.000.,-
  - Realisasi : Rp. 2.611.600,-
  - Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel.
  - Hasil : Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel  
Dengan realisasi 5 Laporan
  - Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Masukan dana : Rp. 22.268.820-
  - Realisasi : Rp.19.829.000,-
  - Keluaran : Presentase Penyediaan komponen instalasi listrik.
  - Hasil : Presentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik  
Dengan realisasi 89,04 %
  - Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung
8. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
- Masukan dana : Rp. 11.788.300,-

- Realisasi : Rp. 10.571.500,-
  - Keluaran : Presentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
  - Hasil : Presentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dengan realisasi 89,68 %.
  - Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Masukan dana : Rp. 176.230.700,-
  - Realisasi : Rp. 160.973.000,-
  - Keluaran : Presentase penyediaan bahan logistik.
  - Hasil : Presentase penyediaan Bahan Logistik Dengan realisasi 91,34 %.
  - Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
- Masukan dana : Rp. 40.296.000,00,-
  - Realisasi : Rp. 39.330.000,00,-
  - Keluaran : Presentase Penyediaan Bahan Bacaan.
  - Hasil : Presentase Penyediaan Bahan Bacaan Dengan realisasi 97,60%.
  - Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung
11. Pengadaan Mebel
- Masukan dana : Rp. 49.628.749,00
  - Realisasi : Rp. 41.800.000,00,-
  - Keluaran : Presentase Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai.
  - Hasil : Cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Realisasi sebesar 84,22 %
  - Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Masukan dana : Rp. 358.748.407,00,-
  - Realisasi : Rp. 259.911.000,00,-
  - Keluaran : Presentase Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai.
  - Hasil : Cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dengan realisasi 72,45%.
  - Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung
13. Penyediaan Jasa surat menyurat

- Masukan dana : Rp. 129.815.180,00 -
  - Realisasi : Rp. 128.911.080,00,-
  - Keluaran : Presentase Penyediaan ATK.
  - Hasil : Presentase Penyediaan ATK  
Dengan Realisasi 99,30 %
  - Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Masukan dana : Rp. 167.452.000,00,-
  - Realisasi : Rp. 113.116.151,00,-
  - Keluaran : Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi .
  - Hasil : Prentase Penyediaan Jasa Komunikasi  
Dengan realisasi 67,55 %.
  - Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Masukan dana : Rp. 2.000.000,00-
  - Realisasi : Rp. 2.000.000,00,-
  - Keluaran : Presentase Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Hasil : Presentase Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Dengan realisasi 100%.
  - Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Masukan dana : Rp. 139.769.220,00,-
  - Realisasi : Rp. 98.387.020,00,-
  - Keluaran : Presentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang  
Urusan Pemerintah Daerah.
  - Hasil : Presentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang  
Urusan Pemrintah Daerah  
Dengan realisasi 70,39%.
  - Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan ,Pajak,dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Masukan dana : Rp. 717.219.560,00,-
  - Realisasi : Rp. 389.588.060, 00
  - Keluaran : Presentase Terlaksananya Biaya Pemeliharaan, Pajak dan  
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan selama  
satu Tahun.
  - Hasil : Prosentase Terlaksananya Biaya PemeliharaanPajak dan  
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama  
Satu Tahun

Dengan realisasi 54,31 %.

- Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung

18. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

- Masukan dana : Rp. 121.031.824,00
- Realisasi : Rp. 39.030.000,00,-
- Keluaran : Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Hasil : Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  
Dengan realisasi 32,25 %.
- Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung

19. Fasilitas Kunjungan Tamu

- Masukan dana : Rp. 2.711.379,00,-
- Realisasi : Rp. 2.402.500,00,-
- Keluaran : Presentase Fasilitas Makan Minum kunjungan Tamu
- Hasil : Presentase Fasilitas Makan Minum kunjungan Tamu dengan realisasi sebesar 88,61 %
- Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung

20. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Masukan dana : Rp. 198.629.172,00,-
- Realisasi : Rp. 0,-
- Keluaran : Persentase Jumlah unit kendaraan dinas operasional lapangan yang disediakan
- Hasil : Presentase Jumlah unit kendaraan dinas operasional lapangan yang disediakan dengan realisasi sebesar 0 %
- Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung

21. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

- Masukan dana : Rp. 84.166.455,00,-
- Realisasi : Rp. 83.628.132,00,-
- Keluaran : Persentase Dokumen Monitoring ,Evaluasi dan Penilaian Kinerja
- Hasil : Presentase Dokumen Monitoring,Evaluasi dan penilaian kinerja dengan realisasi sebesar 99,36 %
- Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung

22. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- Masukan dana : Rp. 170.335.821,00,-
- Realisasi : Rp. 143.328.280,00,-
- Keluaran : Persentase pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Badung
- Hasil : Persentase Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Badung yang dikelola  
Dengan realisasi 84,14 %

Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung

#### 23. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

- Masukan dana : Rp. 203.143.164,00,-
- Realisasi : Rp. 202.568.800,00,-
- Keluaran : Jumlah layanan pengaduan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- Hasil : Jumlah layanan pengaduan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah  
Dengan realisasi 3 Dokumen,99,72 %

Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung

#### 24. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

- Masukan dana : Rp. 8.277.204.731,00,-
- Realisasi : Rp. 7.018.606.900,00,-
- Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan konten dan Perencanaan Media Komunikasi.
- Hasil : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Dengan Realisasi Anggaran sebesar 84,79 %.
- Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung

#### 25. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

- Masukan dana : Rp. 19.119.142,00,-
- Realisasi : Rp. 10.455.900,00,-
- Keluaran : Jumlah media komunitas yang melaksanakan diseminasi informasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
- Hasil : Jumlah media komunitas yang melaksanakan diseminasi informasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah  
Dengan realisasi 54,68 %
- Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung

#### 26. Pelayanan Informasi Publik

- Masukan dana : Rp. 153.887.748,00,-
- Realisasi : Rp. 153.127.500,00,-
- Keluaran : Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Pemerintah Daerah.
- Hasil : Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Pemerintah Daerah dengan realisasi 99,50 %
- Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung

#### 27.Layanan Hubungan Media

- Masukan dana : Rp. 57.887.726,00,-
- Realisasi : Rp. 54.812.600,00,-
- Keluaran : Jumlah Layanan Hubungan Media
- Hasil : Jumlah Layanan Hubungan media dengan realisasi sebesar 94,68 %
- Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung

#### 28. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

- Masukan dana : Rp 7.555.534,00,-
- Realisasi : Rp. 6.761.100,00
- Keluaran : Persentase Terlaksananya Pemantauan jumlah laporan layanan implementasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah.
- Hasil : Persentase Terlaksananya Pemantauan jumlah laporan layanan implementasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah Dengan realisasi 89,48 %
- Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung

#### 29. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

- Masukan dana : Rp. 44.920.344,0,-
- Realisasi : Rp. 41.206.600,00,-
- Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital .
- Hasil : Jumlah Kelompok Masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital Dengan realisasi 91,73 %
- Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung

#### 30. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten /Kota

- Masukan dana : Rp. 63.470.745,00,-
- Realisasi : Rp. 52.770.100,00
- Keluaran : Persentase opd yang memanfaatkan layanan IP Publik.
- Hasil : Presentase opd yang memanfaatkan layanan IP Publik dengan realisasi sebesar 83,14 %
- Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung

#### 31. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Masukan dana : Rp. 3.890.987.311,00,-
- Realisasi : Rp. 2.930.966.100,00,-

- Keluaran : Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
- Hasil : Persentase meningkatnya pengelolaan Nama Domain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung  
Dengan realisasi 75,32 %
- Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung

### 32. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

- Masukan dana : Rp. 65.360.088.858,00,-
- Realisasi : Rp. 36.116.608.360,00,-
- Keluaran : Persentase data layanan akses internet yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Hasil : Persentase data layanan akses internet yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota  
Dengan realisasi 55,26 %
- Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung

### 33. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Masukan dana : Rp. 970.412.000,00,-
- Realisasi : Rp. 415.333.800,00,-
- Keluaran : Persentase layanan pemerintahan yang terhubung dengan sistem penghubung layanan.
- Hasil : Persentase layanan pemerintah yang terhubung dengan sistem penghubung layanan  
Dengan realisasi 42,79 %
- Sasaran : Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung

### 34. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik

- Masukan dana : Rp. 1.539.561.750,00,-
- Realisasi : Rp. 1.516.354.640,00,-

- Keluaran : Jumlah layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan.
- Hasil : Jumlah layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan  
Dengan realisasi 6 Aplikasi ,Realisasi Keuangan 98,49%
- Sasaran : Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung

#### 35. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- Masukan dana : Rp. 177.883.900,00,-
- Realisasi : Rp. 163.852.000,00,-
- Keluaran : Jumlah layanan hosting website OPD yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah
- Hasil : Jumlah layanan hosting website OPD yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah  
Dengan realisasi 998 Lokasi,dengan realisasi keuangan 92,1%
- Sasaran : Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung

#### 36. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Kabupaten /Kota Cerdas dan Kota Cerdas

- Masukan dana : Rp. 3.054.200,00,-
- Realisasi : Rp. 2.773.500,00,-
- Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan master plan
- Hasil : Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan master plan dengan realisasi 90,81 %
- Sasaran : Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung

#### 37 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

- Masukan dana : Rp. 7.083.700,00,-
- Realisasi : Rpp 5.822.200,00,-
- Keluaran : Jumlah Koordinasi Forum Statistik Sektoral dalam Setahun
- Hasil : Jumlah Koordinasi Forum Statistik Sektoral dalam Setahun  
Dengan realisasi 82,19 %
- Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung.

#### 38. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

- Masukan dana : Rp. 62.750.890,00,-
- Realisasi : Rp. 55.865.700,00,-
- Keluaran : Jumlah OPD dan instansi vertikal yang menggunakan data daerah dalam evaluasi pembangunan.
- Hasil : Terwujudnya Sinergi dan Koordinasi keluar daerah  
Dengan realisasi 89,03 %
- Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung.

#### 39. Membangun Metadata Statistik Sektoral

- Masukan dana : Rp. 9.924.825,00,-
- Realisasi : Rp. 8.617.200,00,-
- Keluaran : Jumlah Dokumen Statistik Sektoral.
- Hasil : Jumlah Dokumen Statistik Sektoral  
Dengan realisasi 86,62 %
- Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung

#### 40. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Masukan dana : Rp. 2.112.380,00,-
- Realisasi : Rp. 1.725.600,00,-
- Keluaran : Jumlah alat penunjang keamanan jaringan persandian.
- Hasil : Jumlah alat penunjang keamanan jaringan persandian  
Dengan realisasi 81,69 %
- Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung

#### 41. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Masukan dana : Rp. 3.872.580,00
- Realisasi : Rp. 1.303.000,-
- Keluaran : Persentase layanan pengelolaan keamanan Pemerintah Daerah
- Hasil : Persentase layanan pengelolaan keamanan Pemerintah Daerah  
Dengan realisasi 79,06 %.
- Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung

#### 42. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik

- Masukan dana : Rp. 4.936.865,00,-
- Realisasi : Rp. 3.966.000,00,-
- Keluaran : Jumlah Ruang Vital yang terjaga keamanan infomasinya

- Hasil : Jumlah Ruang Vital yang terjaga keamanan infomasinya Denganrealisasi 80,33 %
- Sasaran : PemerintahKabupaten Badung

#### 43. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Masukan dana : Rp. 1.968.600,00,-
- Realisasi : Rp. 1.727.600,00,-
- Keluaran : Persentase Sertivikat elektronik yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah
- Hasil : Persentase Sertivikat elektronik yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Dengan realisasi 87,76 %
- Sasaran : PemerintahKabupaten Badung

#### 44. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Masukan dana : Rp. 4.094.800,00,-
- Realisasi : Rp. 3.386.700,00,-
- Keluaran : Persentase terlaksananya operasionalisasi jaring komuniikasi Sandi oleh Pemerintah Daerah
- Hasil : Persentase terlaksananya operasionalisasi jaring komuniikasi Sandi oleh Pemerintah Daerah Dengan realisasi 82,70 %
- Sasaran : PemerintahKabupaten Badung

### 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Pada Umumnya kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak terlalu signifikan namun dalam capaian kinerja yang dihadapi terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Penyediaan Surat Penyediaan Dana tidak sesuai dengan anggaran kas. Surat penyediaan dana disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah
2. Terbatasnya , Sumber Daya manusia.

### 3.3 Penjelasan Belanja yang realisasi keuangannya di bawah 75 % :

1. Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran setelah Perubahan sebesar Rp. 17.597.696.516,00 terealisasi sebesar Rp. 12.875.744.931,00 ( 73,01 % ) kurang dari 75 %, Hal ini disebabkan karena adanya beberapa jabatan yang kosong. Antara lain

- Jafung Kepegawaian ahli muda, Jafung Pranata Humas ( 2 ) pada Bidang PKP, Sandiman, Staf Pengelola Kepegawaian, Staf Pengelolala Keuangan ( Pengelola Gaji, Petugas Pembukuan ,Verifikasi).
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Anggaran setelah perubahan adalah Rp. 198.629.172,00, terealisasi sebesar Rp. 0,- (0%), kurang dari 75 %, karena adanya kebijakan manajemen Kas daerah ,maka pengadaan kendaraan dinas tidak dilaksanakan.
  3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran setelah perubahan adalah Rp. 358.748.407,00, terealisasi sebesar Rp. 259.911.000,00 (72,45%), realisasi kurang dari 75 % karena adanya selisih antara harga penawaran dan harga pada DPA dan ada beberapa unit barang yg tidak bisa diproses karena membutuhkan waktu ( Pre Oder ) yang cukup lama sehingga dikawatirkan melewati batas waktu penyelesaian pekerjaan dan pembayaran.
  4. Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik anggaran Perubahan sebesar Rp. 167.452.000,00, terealisasi sebesar Rp. 113.116.151,00 ( 67,55 % ), realisasi kurang dari 75 %. Karena Listrik CCTV dan Telepon direalisasikan sesuai dengan Pemakaian /Kebutuhan dan tagihan .
  5. Belanja Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas jabatan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 139.769.220,00 terealisasi sebesar Rp 98.387.020,00 (70,39 %) kurang dari 75% karena realisasi disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan kendaraan jabatan .
  6. Belanja Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional dan lapangan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 717.219.560,00 terealisasi sebesar Rp 389.588.060,00 (54,32 %) kurang dari 75% karena realisasi disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan kendaraan operasional dan lapangan,hal ini juga disebabkan bahan bakar untuk kendaraan yang rencananya di sewa dibatalkan karena adanya kebijakan manajemen kasda .
  7. Pemeliharaan Peralatan Mesin anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp. 121.031.824,00, terealisasi sebesar Rp. 39.030.000,00 ( 32,25 % ) kurang dari 75 %, pemeliharaan peralatan mesin direalisasikan sesuai dengan kebutuhan ( kerusakan ),
  8. Pengelolaan Media Komunikasi Publik anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 19.119.142,00, terealisasi sebesar Rp. 10.455.900,00 ( 54,69 ) kurang dari 75 %,hal ini disebabkan karena pembinaan sudah dilaksanakan ke desa di Kabupaten Badung dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Propinsi.
  9. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp. 65.360.088.858,00 terealisasi sebesar Rp. 36.216.209.215,00 (55,41) realisasi kurang dari 75 %, hal ini disebabkan karena tidak terbitnya Surat Penyediaan Dana terkait belanja modal cctv ,belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa kusus tidak bisa dilaksanakan karena penyedia tidak sanggup melaksanakan karena

keterbatasan waktu, dan hal ini juga disebabkan karena adanya selisih antara harga penawaran dengan DPA.

10. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 970.412.000,00, terealisasi sebesar Rp. 415.333.800,00 dengan presentase sebesar 42,80 %, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan manajemen kas daerah sehingga Belanja pemeliharaan Komputer, Peralatan Komputer Lainnya ( Belanja pemeliharaan command center ) tidak bisa dilaksanakan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah

Kabupaten Badung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- **Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas**

Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

- **Basis Akrua (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca**

Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

##### **A. NERACA**

##### **I. ASET LANCAR**

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi.

##### **I.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

##### **I.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo

kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### **I.3. Belanja dibayar di muka**

Belanja dibayar di muka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

### **I.4. Piutang Pajak**

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

### **I.5. Piutang Retribusi**

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

### **I.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

### **I.7. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APFP.

### **I.8. Piutang Lainnya**

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

### **I.9. Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

## **II. ASET TETAP**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva tang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

### **II.1. Tanah**

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

## **II.2. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan.

Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

## **II.3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

## **II.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain

meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung ( Tenaga kerja, bahan baku ) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

#### **I.5. Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

#### **II.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

#### **II.7. Akumulasi Penyusutan**

Depresiasi / penyusutan atas Aktiva Tetap sampai dengan 31 Desember 2024 dihitung sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016.

### **III. ASET LAINNYA**

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

### **III.1. Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

### **III.2. Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Jud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Aset Lain-lain dicatat dengan nilai ninal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya.

## **IV. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

### **IV.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potong PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potong PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

### **IV.2. Uang Muka Kas Daerah**

Merupakan saldo Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal Neraca. Perkiraan ini merupakan perkiraan timbal balik (reciprocal) yang akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

### **IV.3. Pendapatan Ditangguhkan**

Merupakan saldo uang yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari wajib pajak dan wajib retribusi yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal Neraca.

Perkiraan ini merupakan perkiraan timbal balik (reciprocal) yang akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

### **IV.4. Hutang Jangka Pendek Lainnya**

Hutang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Hutang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

## **V. EKUITAS DANA**

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

### **V.1. EKUITAS DANA LANCAR**

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar terdiri dari Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Cadangan Aset Lancar Lainnya dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

### **V.2. EKUITAS DANA INVESTASI**

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

## **B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

### **I. Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada

Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

## **II. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

## **C. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan pelaporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan disajikan tepat waktu. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sbb:

### **a. Pendapatan LO**

Pendapatan LO adalah Pendapatan Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik yang diterima secara tunai maupun masih berupa piutang.

### **b. Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan kondisi antara lain: Beban diakui sebelum pengeluaran kas, Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dan beban diakui setelah pengeluaran kas. Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban atas beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

dan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban disajikan dalam Laporan Operasional disesuaikan dengan klasifikasi ekonomi yaitu :

- Beban Operasi
- Beban Transfer
- Beban Non Operasional
- Beban Luar Biasa

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban antara lain

-Pengeluaran Beban tahun berkenaan

Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja

- Informasi lainnya yang dianggap perlu

c. Surplus/Defisit dari operasi

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos ini.

d. Kegiatan Non Operasional

e. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa

f. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah

g. Surplus/Defisit LO

Merupakan surplus/defisit Lo pada akhir periode pelaporan yang dipindahkan ke pelaporan perubahan ekuitas.

## **D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

### **BAB V**

## **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

### **5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

#### **5.1.1 PENDAPATAN – LRA**

Jumlah Pendapatan-LRA Dinas Komunikasi dan Informatika KabupatenBadung dalam Tahun Anggaran 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,-Sedangkan realisasi pendapatan LRA tahun 2023 sebesar Rp. 154.592.919,52

Perbandingan Realisasi Pendapatan LRA Per 31 Desember 2024 dan 2023 sesuai Stándar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut :

**Tabel 5.1.1 Realisasi Pendapatan LRA Per 31 Desember 2023 dan 2024-\***

No.	Uraian	Target Setelah Angg. Perubahan 2024	Realisasi 2024		Realisasi 2023
			Rp	%	
a	Pendapatan Asli Daerah (PAD) LRA	10.000.000,00	-	0	154.592.919,52
	Jumlah	10.000.000,00	-	0	154.592.919,52

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah -LRA, target anggaran setelah perubahan 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2023 sebesar Rp. 154.592.919.52,- Rincian atas Realisasi PAD – LRA tersebut sebagai berikut

**Tabel5.1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA Tahun 2024dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023(Rp)
	<b>Pendapatan Daerah</b>	10.000.000,00	-		136.934.919,52
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		-		136.934.919,52
a.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	0,00	00.00	131.454.000,00
b.	Lain-lain PAD yang sah.	10.000.000	-	-	5.480.919,52
	Jasa Giro Pada kas Bendahara	10.000.000	-	00.00	4.460.919,52
	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Jasa Kantor - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	0,00	0,00	0	1.020.000,00
	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian menara Telekomunikasi	0,00	0,00		483.960,00

Gambaran Angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Yang ( PAD )

a. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah Target Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp.0, dengan realisasi sebesar 0 Tahun 2023 Target Anggaran sebesar Rp. 145.188.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 149.112.000. Berdasarkan undang undang 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya , Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak ada lagi menjadi objek retribusi sebagaimana yang diatur dalam undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Dan berdasarkan pertimbangan hukum dari bagian Hukum Setda Kabupaten Badung NO.180/6342/HK tanggal 25 April 2022 yang menyebutkan bahwa kegiatan retribusi menara Telekomunikasi dilaksanakan sampai dengan akhir 2023. Sehingga Tahun 2024 tidak dilaksanakan .Adapun Rincian atas

pendapatan retribusi Tahun 2023 sebagai berikut :

b.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp. 0 atau 0 % sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 4.460.919,52

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Menara Telekomunikasi dari PT Telekomunikasi Selular	-	-	0,00	654.000,00
2	Retribusi Menara Telekomunikasi dari PT EPID Menara Asetco	0,00	-	0,00	23.544.000
3	Retribusi Menara Telekomunikasi Bali Towerindo Sentra ( BTS )		-		115.758.000
4	Retribusi Menara Telekomunikasi ( Li Wan Wang erik )		-		1.308.000
5	Dayamitra		-		7.848.000
	Jumlah	0,00	-	0,00	149.112.000,00

Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.1.3 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro-LRA	10.000.000	-	0,00	4.460.919,52
2	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	-	0,00	-
3	Pendapatan Hibah ( Sumbangan Pihak ketiga/Sejenis		0,00		0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa ( Belanja Jasa Kantor - honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana		-		1.020.000
	Jumlah	10.000.000	-	0,00	5.480.919,52

**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berupa**

- a. **Jasa Giro Pemegang Kas** dengan target anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %. Mengalami penurunan dari tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 4.460.919,52. Karena pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada Bendahara Penerimaan ,jasa giro diinput oleh BPKAD,

Berikut rincian penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas tahun 2024

**Tabel.5.1.4 Penerimaan Jasa Giro Tahun 2024 dan Tahun 2023**

No.	Bulan	Realisasi 2024(Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Januari	0,00	439.268,80
2	Pebruari	0,00	510.441,88
3	Maret	0,00	510.541,27
4	April	0,00	448.215,67
5	Mei	0,00	423.173,28
6	Juni	0,00	487.354,54
7	Juli	0,00	367.362,11
8	Agustus	0,00	373.002,38
9	September	0,00	116.606,04
10	Oktober	0,00	176.013,58
11	Nopember	0,00	208.971,18
12	Desember	0,00	399.968,79
	Jumlah	0,00	4.460.919,52

- b. Realisasi penerimaan Jasa Giro sebesar Rp 0 merupakan jumlah penerimaan Jasa giro selama Tahun Anggaran 2024. Jasa Giro ( Rp.4.149.291,71 )tersebut Diinput oleh BPKAD karena Diskominfo tidak ada Bendahara Penerimaan.

### 5.1.2 BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja dengan target anggaran sebesar Rp 100.984.471.546,00 realisasinya sebesar Rp 63.375.622.629,00 atau 62,76 %. Mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 74.596.177.646,00 Belanja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.Berikut rincian belanja tahun 2024

**Tabel.5.1.2 Belanja th.2024 dan tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
a	Belanja Operasi	74.820.238.265,00	62.948.810.774,00	84,13	66.862.842.646,00
b	Belanja Modal	26.164.233.281,00	426.811.855,00	1,63	7.733.335.000,00
	Jumlah Belanja	100.984.471.546,00	63.375.622.629,00	62,76	74.596.177.646,00

#### 1. Belanja Operasi

Target anggaran sebesar Rp. 74.820.238.265,00 terealisasi sebesar Rp. 62.948.810.774,00

atau 84,13 %, mengalami peningkatan dibandingkan realisasi belanja th.2023

Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut.

**Tabel 5.1.3 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran Perubahan 2024(Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
a	Belanja Pegawai	17.597.696.516,00	12.848.197.431,00	73,01	11.424.558.535,00
b	Belanja Barang dan Jasa	57.222.541.749,00	50.100.613.343,00	87,55	55.438.284.111,00
	Jumlah Belanja	74.820.238.265,00	62.948.810.774,00	84,13	66.862.842.646,00

Gambaran realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

**a) Belanja Pegawai**

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan PNS.

Belanja Pegawai, terealisasi Rp. 17.597.696.516,00 dari anggaran Rp. 12.848.197.431,00 atau 73,01%, Mengalami Peningkatan dari realisasi tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp 11.424.558.535 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4 Belanja Pegawai**

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2024(Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.777.478.849,00	4.419.784.762,00	76,50	3.939.845.715,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.820.217.667,00	8.428.412.669,00	71,31	7.484.712.820,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.597.696.516,00</b>	<b>12.848.197.431,00</b>	<b>73,01</b>	<b>11.424.558.535,00</b>

**b) Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, dan perjalanan dinas, Tahun 2023 dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut

Belanja Barang dan Jasa, terealisasi Rp. 50.100.613.343,00 dari anggaran Rp. 57.222.541.749,00 atau 87,55% mengalami penurunan dari realisasi tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 55.438.284.111,00

## 2. Belanja Modal

Pagu anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 26.164.233.281,00 terealisasi Rp. 426.811.855,00 atau sebesar 1,63 % mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 7.733.335.000. Komponen belanja modal sebagai berikut.

**Tabel 5.1.5 Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023(Rp)	%	Realisasi 2022(Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.242.673.807,00	7.684.645.000,00	93,23	5.961.739.050,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya	48.993.735	48.690.000	99,38	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0,00
Jumlah		8.291.667.542	7.733.335.000	93,27	5.961.739.050

## 5.2 LAPORAN OPERASIONAL

### 5.2.1 PENDAPATAN LO

Pendapatan Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Saldo Pendapatan LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 51.384.830,- mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dimana diperoleh pendapatan LO sebesar Rp. 409.686.158,52,- Realisasi Pendapatan LO Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 terinci sebagai berikut:

**Tabel 5.8. Rincian Pendapatatan LO Tahun 2024 dan tahun 2023**

No	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023
1	<b>PENDAPATAN-LO</b>	<b>51.384.830,00</b>	<b>409.686.158,52</b>
	<b>a. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>-</b>	<b>154.592.919,52</b>
	Retribusi Daerah (Lo)	-	149.112.000,00
	Lain Lain PAD yang sah LO	-	5.480.919,52
	<b>b. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>	<b>51.384.830,00</b>	<b>255.093.239,00</b>
	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>51.384.830,00</b>	<b>255.093.239,00</b>

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.000 mengalami penurunan sebesar Rp. 149.112.000 atau 100 % dibandingkan tahun 2023 dimana diperoleh pendapatan LO sebesar Rp. 149.112.000,00

**Tabel 5.9. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO**

URAIAN	Saldo 2024	Saldo 2023
Retribusi Daerah – LO	0,00	149.112.000,00
Lain-lain PAD yang sah – LO	0,00	5.480.919,52
Jumlah	0,00	154.592.919,52

Saldo masing-masing jenis PAD TA.2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	Saldo 2024	Saldo 2023
<b>Lain lain PAD yang Sah LO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.480.919,52</b>
Pendapatan Jasa Giro	0,00	4.460.919,52
Denda Retribusi	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Jasa	0,00	1.020.000,00

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah tahun 2024 terealisasi Rp. 0 mengalami penurunan sebesar Rp. 5.480.919,52 dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 5.480.919,52. Hal ini disebabkan Diskominfo tidak memiliki Bendahara Penerimaan sehingga pendapatan jasa giro diinput oleh BPKAD.

#### B. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 51.384.830,- mengalami penurunan sebesar Rp.203.708.409,- dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 255.093.239,-.

**Tabel 5.0. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2024 dan tahun 2023**

No	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023
<b>1</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LO</b>	<b>51.384.830,00</b>	<b>255.093.239,00</b>
	- Pendapatan Hibah LO ( Sumbangan Pihak Ketiga) dari BTS dan HSV	<b>51.384.830,00</b>	<b>255.093.239,00</b>

### 5.2.2 Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban tahun 2024 terinci sebagai berikut :

**Tabel 5.11 .Rincian Beban tahun 2024 dan tahun 2023**

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 terdapat beban sebesar Rp.

URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023
<b>BEBAN</b>	<b>62.947.023.259,00</b>	<b>78.578.938.638,00</b>
Beban Pegawai	12.848.197.431	11.424.558.535,00
Beban Persediaan	388.122.300	368.936.131,00
Beban Jasa	39.070.015.028,00	38.345.920.843,00
Beban Pemeliharaan	10.575.888.500,00	10.154.856.600,00
Beban Perjalanan Dinas	64.800.000,00	36.660.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	<b>8.333.289.243,00</b>	13.175.389.769,00
Beban Uang dan Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak		10.000.000,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat		5.062.616.760,00

62.947.023.259 mengalami penurunan sebesar Rp.15.631.915.379 dari realisasi tahun 2023 Rp. 78.578.938.638 Beban disini berupa beban operasi yang terdiri dari :

- Beban Pegawai terealisasi Rp 12.848.197.431,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.423.638.896 dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 11.424.558.535,- ,-

**Tabel 5.12. Rincian beban pegawai tahun 2024 dan tahun 2023**

URAIAN	Saldo 2024	Saldo 2023
Beban Gaji dan Tunjangan	4.419.784.762,00	3.939.845.715,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	8.428.412.669,00	7.484.712.820,00
Honorarium PNS		
Jumlah	12.848.197.431,00	11.424.558.535,00

- Beban Persediaan terealisasi Rp.388.122.300 mengalami peningkatan sebesar Rp. 19.186.169 dari realisasi tahun 2023 Rp 368.936.131

**Tabel 5.13. Rincian beban persediaan tahun 2024 dan tahun 2023**

URAIAN	Saldo 2024	Saldo 2023
Beban Cetak dan Penggandaan	69.869.200,00	52.883.138,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan	13.160.000,00	45.812.500,00
Beban Suku Cadang,Alat Studio dan komunikasi	0,00	18.263.505,00
Beban Bahan Bahan Bakar Pelumas	67.118.500,00	37.894.800,00
Beban Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor ATK	41.859.400,00	28.833.013,00
Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Kertas dan cover	27.667.500,00	22.892.200,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	9.440.000,00	8.710.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	55.457.000,00	48.729.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor alat listrik	3.744.000,00	14.674.975,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	97.404.200,00	88.935.000,00
Beban Komponen Komponen Peralatan	0,00	0,00
Beban Komponen Komponen lainnya	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.402.500,00	1.308.000,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Jumlah	388.122.300,00	368.936.131,00

- Beban jasa terealisasi Rp. 39.070.015.028 mengalami peningkatan sebesar Rp. 714.094.185 dari realisasi tahun 2023 Rp . 38.345.920.843

**Tabel 5.14. Rincian beban jasa tahun 2024 dan tahun 2023**

URAIAN	Saldo 2024	Saldo 2023
Beban Jasa Kantor	38.561.968.113,00	37.892.439.602,00
Beban Premi Asuransi	195.692.152,00	214.560.312,00
Beban Jasa Konsultansi	0,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Mesin	49.571.923,00	49.571.923,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( Availability Payment )	262.782.840,00	189.349.006,00
Jumlah	39.070.015.028,00	38.345.920.843,00

Beban Pemeliharaan terealisasi Rp.10.575.888.500,- mengalami kenaikan sebesar

RP. 421.231.900,- dari realisasi tahun 2023 Rp. 10.154.656.600

**Tabel 5.15. Rincian beban pemeliharaan tahun 2024 dan tahun 2023**

URAIAN	Saldo 2024	Saldo 2023
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.426.787.500,00	10.154.856.600,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.765.000,00	0,00
Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	132.336.000,00	
Jumlah	10.575.888.500,00	10.154.856.600,00

Beban Perjalanan Dinas terealisasi Rp.64.800.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.28.140.000,- dari realisasi tahun 2023 Rp. 36.660.000,-

**Tabel 5.15. Rincian Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 dan tahun 2023**

URAIAN	Saldo 2024	Saldo 2023
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.800.000,00	36.660.000,00
Jumlah	64.800.000,00	36.660.000,00

- Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp. 8.333.289.243 mengalami penurunan sebesar Rp.4.842.100.526 dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 13.175.389.769

**Tabel 5.17. Rincian beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 dan tahun 2023**

URAIAN	Saldo 2024	Saldo 2023
Beban Penyusutan ,Amortisasi	8.333.289.243,00	13.175.389.769,00
Jumlah	8.333.289.243,00	13.175.389.769,00

- Beban Hibah terealisasi sebesar Rp. 0 mengalami penurunan sebesar Rp. 5.062.616.760,- dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 5.062.616.760

**Tabel 5.17. Rincian beban Hibah tahun 2024 dan tahun 2023**

URAIAN	Saldo 2024	Saldo 2023
Beban Hibah	0,00	5.062.616.760,00
Jumlah	0,00	5.062.616.760,00

### 5.2.3 Pos Luar Biasa

Kegiatan Non Operasional adalah Kegiatan yang terlaksana di luar kegiatan pokok.

### 5.2.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin

terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

### 5.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### 5.3.1 Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.18. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024 dan tahun 2023**

URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>52.985.771.121,57</b>	<b>56.803.766.783,58</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	<b>(71.228.927.672,00)</b>	<b>(78.169.252.479,48)</b>
<b>RK PPKD</b>	63.375.622.629,00	74.441.584.726,48
<b>DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR :</b>		
<b>Koreksi Nilai Persediaan</b>	-	-
<b>Koreksi Selisih Revaluasi Aset tetap</b>		
Lain Lain	-	<b>(90.327.909,01)</b>
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>45.132.466.078,57</b>	<b>52.985.771.121,57</b>

Ekuitas awal sebesar Rp. 52.985.771.121,57 yang merupakan saldo ekuitas th. 2023.

Surplus/Defisit LO Tahun 2024 terealisasi Rp (71,228.927.672,-) mengalami penurunan dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp. (78.169.252.479,48).

RK.PPKD (Saldo Kewajiban untuk dikonsolidasikan) tahun 2024 sebesar Rp. 63.375.622.629.0 mengalami penurunan sebesar Rp. 11.065.962.097,- dari saldo tahun 2023, Rp. 74.441.584.726,48 Ekuitas Akhir tahun 2024 sebesar Rp. 45.132.466.078,57 mengalami penurunan sebesar Rp. 7.853.305.043,- dari saldo tahun 2023 Rp. 52.985.771.121,57

### 5.4 NERACA

Neraca merupakan laporan keuangan yang mencakup aset kewajiban dan modal/ekuitas.

Berikut Total Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2024 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Komponen Aset terdiri dari :

#### 1. Aset Lancar

"5.1.9	ASET	Rp.		Rp.	
	ASET Lancar	Rp.	4.362.500	Rp.	2.667.000
	a,Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.		Rp.	
	b. Persediaan	Rp.	4.362.500	Rp.	2.667.000
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.362.500</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.667.000</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024, yang terdiri dari Sisa Kas (Uang Persediaan/UP ) di bendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024 yang telah disetor ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yaitu STS UP Nomor:51.03/06.0/000001/UP-

NIHIL/2.16.2.20.2.21.04.000/PPR3/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 sebesar Rp. 267.916.989,00 (Fotocopy STS terlampir).

Sehingga saldo Bank Bendahara Pengeluaran di Bank BPD Bali dengan NomorRekening 009.010.5001910 sebesar Rp. 0,00

**a.) Persediaan Tahun 2024 Rp4.362.500,00**

Rincian Persediaan tahun 2024 sebagai berikut

**Tabel.5.19. Rincian Persediaan tahun 2024 dan tahun 2023**

No	Persediaan	Saldo Awal (Rp.) Per 31 Des 2023	Mutasi		Saldo Akhir (Rp.) Per 31 Des 2024
			Tambah ( Rp.)	Kurang ( Rp.)	
1	Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Barang Cetak	260.000,00	195.000,00	260.000,00	195.000,00
3	Bahan Bakar	1.350.000,00	1.815.000,00	1.350.000,00	1.815.000,00
4	Benda Pos	820.000,00	1.400.000,00	820.000,00	1.400.000,00
5	Kertas Cover	117.000,00	416.500,00	117.000,00	416.500,00
6	Bahan Komputer	120.000,00	536.000,00	120.000,00	536.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.667.000,00</b>	<b>4.362.500,00</b>	<b>2.667.000,00</b>	<b>4.362.500,00</b>

Persediaan di Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Persediaan Alat Tulis Kantor pada Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0
2. Persediaan Barang Cetak sebesar Rp.195.000, mengalami penurunan sebesar Rp 65.000,, dibandingkan dengan persediaan Tahun 2023 sebesar Rp.260.000
3. Persediaan Bahan Bakar sebesar Rp.1.815.000,00mengalami peningkatan sebesar Rp.465.000,00 dibandingkan dengan persediaan tahun 2023 sebesar Rp1.350.000,-
4. Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya sebesar Rp 1.400.000 mengalami Peningkatan sebesar Rp. 580.000.-.dibandingkan dengan persediaan Tahun 2023 sebesar Rp. 820.000,-
5. Kertas Cover sebesar Rp.416.500, mengalami penurunan dibandingkan dengan persediaan Tahun 2023 sebesar Rp. 117.000
6. Bahan Komputer sebesar Rp. 536.000, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp.120.000-

**2. Aset Tetap Rp. 44.047.345.788,46**

Saldo aktiva tetap pada Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Badung per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 44.047.345.788,46

**a) Tanah Rp. 0,00**

**b) Peralatan dan Mesin Rp137.997.760.801,68**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 137.997.760.801,68 mengalami peningkatan dari tahun 2023 dengan saldo Rp. 137.454.263.971,68 Hal ini disebabkan karena adanya penambahan Belanja Modal Tahun 2024 senilai Rp.426.811.855,00 yang didalamnya termasuk Belanja Penyusunan DED senilai Rp.99.600.855,00 (Konstruksi dalam Pengerjaan), Hibah Value Added Pihak Ketiga dari PT. Bali Towerindo Sentra Tbk. (BTS) dan PT. Parsaoran Global Datatrans (HSP) berupa Peralatan Jaringan (Akses Point) senilai Rp. 51.384.830,00 dan Mutasi Barang Antar Perangkat Daerah Berupa Hidrant dan APAR senilai Rp. 164.901.000,00. Daftar penambahan dan pengurangan aset, terinci sebagai berikut:

**Tabel 5.20. Daftar Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2024**

Saldo Akhir	Rp	137.997.760.801,68	Rp	137.454.263.971,68
		Tahun 2024		Tahun 2023
Saldo Awal				
- Peralatan dan Mesin	Rp	137.454.263.971,68	Rp	133.740.819.371,53
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	426.811.855,00	Rp	7.684.645.000,00
- Belanja Modal (Hutang)	Rp	-	Rp	-
- Non Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	164.901.000,00	Rp	0,00
- Hibah	Rp	51.384.830,00	Rp	236.829.734,00
- Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran	Rp.			0,00
Jumlah	Rp	138.097.361.656,68	Rp	141.662.294.105,53
Pengurangan				
- Penghapusan peralatan dan mesin				
- Mutasi Absensi	Rp	0,00	Rp	8.441.640,00
- Mutasi Alat Viccon	Rp	0,00	Rp	0,00
- Ekstrak Kompetible	Rp	0,00	Rp	1.600.000,00
- Pengembalian Mobil	Rp	0,00	Rp	0,00
- Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Konstruksi dalam Pengerjaan		99.600.855,00		0,00
- Koreksi (ekstra)	Rp	0,00	Rp	4.197.988.493,85
Jumlah	Rp	99.600.855,00	Rp	4.208.030.133,85
Jumlah	Rp	137.997.760.801,68	Rp	137.454.263.971,68

**c) Gedung dan Bangunan Rp. 1.712.308.645,07**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.712.308.645,07 yang mana tidak mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang bersaldo Rp.1.712.308.645,07

**Tabel 5.17 Rincian Gedung dan Bangunan Tahun 2024**

	Tahun 2024		Tahun 2023	
Saldo Awal				
- Gedung dan Bangunan	Rp	1.712.308.645,07	Rp	1.809.932.788,08
Penambahan				-
- Belanja Modal	Rp		Rp	
- Non Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	1.712.308.645,07	Rp	1.809.932.788,08
Pengurangan				
- Koreksi ( Penyesuaian)	Rp	0,00	Rp	
- Kapitalisasi	Rp	0,00	Rp	0,00
- Koreksi (ekstra)	Rp	0,00		0,00
- Pengembalian Mobil	Rp	0,00	Rp	
- Koreksi (ekstra)	Rp	0,00	Rp	
- Penghapusan	Rp	0,00		97.624.143,01
Jumlah	Rp	0,00	Rp	97.624.143,01
Jumlah	Rp	1.712.308.645,07	Rp	1.712.308.645,07

**d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.0,-**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 senilai Rp 188.918.250,00. Hal ini disebabkan karena adanya Usulan Penghapusan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Tiang Galpanis dengan kondisi rusak berat senilai Rp. 188.918.250,00 yang kemudian masuk kedalam kategori Aset Lainnya. Berikut rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2024.

**Tabel 5.18 Rincian Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2024 dan tahun 2023**

	Tahun 2024		Tahun 2023	
Saldo Akhir	Rp	-	Rp	188.918.250,00
Saldo Awal		-		-
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	188.918.250,00	Rp	188.918.250,00
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	-	Rp	-
	Rp		Rp	
Jumlah	Rp	188.918.250,00	Rp	188.918.250,00
Pengurangan				
- Penghapusan peralatan dan mesin	Rp	188.918.250,00		
- Koreksi ( Penyesuaian)	Rp	0,00	Rp	0,00
- Kapitalisasi	Rp	0,00	Rp	0,00
- Koreksi ( Mapping )	Rp	0,00		0,00
- Pengembalian Mobil			Rp	
- Koreksi (ekstra)			Rp	
Jumlah	Rp	188.918.250,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	-	Rp	188.918.250,00

**e) Aset Tetap Lainnya Rp 96.316.000,00**

Saldo aset tetap lainnya pada Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2024 sebesar Rp 96.316.000,00 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023. Berikut rincian aset tetap lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2024.

**Tabel.5.20 Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024**

Saldo Akhir	Rp	96.316.000,00	Rp	96.316.000,00
		Tahun 2024		Tahun 2023
Saldo Awal				
- Aset Tetap Lainnya	Rp	96.316.000,00	Rp	96.316.000,00
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	-	Rp	-
- Non Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	96.316.000,00	Rp	96.316.000,00
Pengurangan				
- Penghapusan peralatan dan mesin				
- Koreksi ( Penyesuaian)	Rp	0,00		0,00
- Kapitalisasi	Rp	0,00	Rp	0,00
- Koreksi (ekstra)	Rp	0,00		0,00
- Pengembalian Mobil			Rp	
- Koreksi (ekstra)			Rp	
Jumlah	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	96.316.000,00	Rp	96.316.000,00

**f) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 99.600.855,00**

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan Pada Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2024 bertambah senilai Rp. 99.600.855,00 berupa Belanja Modal Jaringan (Penyusunan DED CCTV)

**Tabel 5.21 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024 dan tahun 2023**

Saldo Akhir	Rp	99.600.855,00	Rp	-
		Tahun 2024		Tahun 2023
Saldo Awal				
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	-	Rp	-
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	99.600.855,00	Rp	-
- Non Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	99.600.855,00	Rp	-
Pengurangan				
- Penghapusan peralatan dan mesin				
- Koreksi ( Penyesuaian)	Rp	0,00	Rp	0,00
- Kapitalisasi	Rp	0,00	Rp	0,00
- Koreksi (ekstra)	Rp	0,00		
- Pengembalian Mobil			Rp	0,00
- Koreksi (ekstra)			Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	99.600.855,00	Rp	-

**f). Akumulasi Penyusutan Rp. (95.858.640.513,29)**

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.( 95.858.640.513,29) mengalami peningkatan, dibandingkan akumulasi penyusutan per 29 Desember 2023 sebesar Rp.(87.807.515.099,29) Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

		29 Des 2024	31 Des 2024	31 Des 2023
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	137.997.760.801,68	(95.549.864.494,29)	(87.422.872.242,29)
3	Gedung dan Bangunan	1.712.308.645,07	(308.776.019,00)	(258.704.232,00)
4	Jalan Irigasi Jaringan	0,00	-	(125.938.625,00)
5	Aset Tetap Lainnya	96.316.000,00	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	99.600.855,00	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>139.905.986.301,75</b>	<b>(95.858.640.513,29)</b>	<b>(87.807.515.099,29)</b>

(Daftar penyusutan aset tetap tahun 2024 terlampir)

**3. Aset Lainnya Rp. 1.089.929.183,11**

a) Tagihan Jangka Panjang	Rp.	0,00
b) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp.	0,00
c) Saldo awal Aset Tidak Berwujud Thn 2024	Rp.	2.385.635.000,00
Penambahan Aset tidak berwujud Thn 2024	Rp.	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud	(Rp.	1.390.777.199,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(Rp.	5.433.616.525,32)
d) Aset Lain-lain	Rp.	5.528.687.907,43

Penambahan Nilai Aset Lain-Lain dari saldo awal tahun 2023 senilai Rp. 5.339.769.657,43 menjadi Rp. 5.433.616.525,32 dikarenakan adanya Usulan Penghapusan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 188.918.250,00.

**4. KEWAJIBAN Rp. 9.171.393**

1) Kewajiban Jangka Pendek Rp. 9.171.393

Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

a) Utang PFK	Rp.	0,00
b) Utang Bunga	Rp.	0,00
c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp.	0,00
d) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp.	0,00

- e) Utang Beban (Listrik dan Telepon) Rp. 9.171.393
- f) Utang Jangka Pendek Lainnya Rp. 0.00

**Utang Beban Rp. 9.171.393**

Saldo utang belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp.9.171.393, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dimana saldo utang belanja sebesar Rp. 9.263.408. Rincian utang belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- Belanja Telepone sebesar Rp. 568.785
- Belanja Listrik CCTV Rp. 8.602.608

URAIAN	2024	2023
Belanja Telepon	568.785,00	582.343,00
Biaya Listrik CCTV	8.602.608,00	8.681.065,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.171.393,00</b>	<b>9.263.408,00</b>

**Utang Jangka Pendek Lainnya Rp. 9.171.393,00**

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 9.171.393 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dimana utang jangka pendek lainnya tercatat Rp.9.263.408

- 2). Kewajiban Jangka Panjang Rp. 0,00
  - a) Utang Dalam Negeri Rp. 0,00
  - b) Utang Luar Negeri Rp. 0,00

**5. EKUITAS Rp. 45.132.466.078,57**

- 1). Ekuitas Rp. 45.132.466.078,57  
 Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2024 yang dikelola oleh SKPD, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 45.132.466.078,57 mengalami penurunan dibandingkan dengan ekuitas tahun 2023 Rp. 52.985.771.121,57 sebesar Rp. 7.853.305.043 dengan rinciannya sebagai berikut.

URAIAN	2024	2023
<b>EKUITAS</b>	<b>45.132.466.078,57</b>	<b>52.985.771.121,57</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>(18.243.156.550,43)</b>	<b>(21.455.813.604,91)</b>
EKUITAS AWAL	52.985.771.121,57	56.713.438.874,57
SURPLUS/DEFISIT LO	(71.228.927.672,00)	(78.169.252.479,48)
<b>EQUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>	<b>63.375.622.629,00</b>	<b>74.441.584.726,48</b>
RK PPKD	63.375.622.629,00	74.441.584.726,48
EKUITAS AKHIR	45.132.466.078,57	52.985.771.121,57

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 73 Tahun 2021 tanggal 13 Desember tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomer 33 tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan, Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah.Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kabupaten Badung yang menyatakan mandat yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di Bidang Komunikasi dan Informatika. Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terdiri dari :

- 1 ( satu ) orang Kepala Dinas
- 1 ( satu ) orang Sekretaris
- 5 ( lima ) orang Kepala Bidang
- 2 orang struktural ( Eselon IV a )
- 16 ( enam belas ) orang Jabatan Fungsional
- 27 ( dua puluh tujuh ) orang staf
- 8 ( P3K )
- 75 ( delapan puluh tujuh ) orang Tenaga Kontrak.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN PENTING TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

Sebagai akhir dari Laporan Catatan Keuangan ( CALK ) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah Perubahan tahun 2023 yang direncanakan dapat direalisasikan atau dilaksanakan dengan prosentase capaian program pada BAB V diatas.

Program-program yang dilaksanakan realisasi keuangannya sebesar 62,76 % diantaranya :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah dapat terlaksana dengan baik yakni dengan lancarnya pelaksanaan tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota ( 73,50 %)
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (85,66)
3. Program Aplikasi Informatika (89,24).
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (81,27)
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (88,15)

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika ini dibuat sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tahun Anggaran 2024 yang berbasis Akrual dimana Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Mangupura, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Badung



I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos.M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19750207 199311 1 002